

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan suatu hal yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas dari daerah tersebut dan harus terkendali dengan baik karena itu dibutuhkan aksesibilitas terhadap perencanaan pembangunan daerah agar bisa terkendali dengan baik. Belum adanya pengevaluasian yang baik terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia yang bisa mengkoordinasikan evaluasi bagi setiap kegiatan yang ada. Teknologi informasi sangat mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan, yaitu adanya sistem pelayanan publik yang dikembangkan dengan menggunakan internet. Salah satu manfaat bagi masyarakat adalah adanya pelayanan publik untuk penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien serta pelayanan publik yang transparan. (*Hammer dan Champy, 2016*).

Perihal upaya dalam memaksimalkan evaluasi pembangunan daerah Kementrian dalam Negeri menegaskan bahwa pentingnya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam memudahkan mengkoordinasi kegiatan yang ada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah agar mampu mengolah data dan informasi dengan baik. Dalam rangka mewujudkan harapan tersebut, tentu saja Pemerintah Pusat yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri tidak bisa beraksi sendiri. Untuk itu, diperlukan peran Pemerintah Daerah selaku penyelenggara pemerintahan yang bertugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah otonom (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, 2016). Salah satunya adalah Provinsi Jawa Barat.

Dengan adanya permasalahan pada Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Barat, yaitu Keterbatasan ketersediaan data yang akurat dan valid, Keterbatasan alat analisis (simulasi) sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan dokumen perencanaan, koordinasi dan komunikasi lintas pemerintahan, Hasil evaluasi dan pengendalian belum seluruhnya menjadi bahan rujukan perencanaan pembangunan daerah.

Provinsi Jawa Barat turut serta dalam memaksimalkan penyelenggaraan layanan publik dalam Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi guna membantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam memenuhi kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, 2016). Adapun Perangkat Daerah yang dimaksud adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Barat pada Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah di Lingkungan Jawa Barat.

Pada Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki beberapa hambatan, yaitu adanya keterbatasan ketersediaan data yang akurat dan valid, keterbatasan alat analisis (simulasi) sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan dokumen perencanaan, koordinasi dan komunikasi lintas pemerintahan dan hasil evaluasi dan pengendalian belum seluruhnya menjadi bahan rujukan perencanaan pembangunan daerah.

Dengan menitikberatkan pada pokok permasalahan tersebut, maka dibutuhkan solusi yang mampu menyelaraskan upaya organisasi dalam memaksimalkan program yang dimiliki dengan penerapan TIK, sehingga aktivitas yang dilakukan organisasi dapat berjalan lebih efektif dan efisien guna mendukung optimasi program di organisasi tersebut. Salah satu penyelesaian yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan perancangan Enterprise Architecture (EA) atau Arsitektur Sistem Informasi yang mampu menyediakan tampilan komprehensif dari peraturan, prinsip, layanan, solusi, standar, hingga pedoman organisasi (Enterprise Architecture Center of Excellence, 2013). Perancangan ini akan menggunakan framework TOGAF ADM yang difokuskan untuk 4 (empat) domain, yaitu Proses Bisnis, Data dan Informasi, Aplikasi, dan Layanan (Tidak termasuk Infrastruktur dan Keamanan) pada BAPPEDA Provinsi Jawa Barat untuk Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pembahasan di atas, penulis menerima rumusan masalah untuk penelitian ini “Bagaimana analisis dan perancangan *blueprint* Arsitektur Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada domain Proses Bisnis, Data dan Informasi, Aplikasi, dan Layanan (Tidak termasuk Infrastruktur dan Keamanan) untuk Program Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)?”

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah menghasilkan rancangan *blueprint Enterprise Architecture (EA)* Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada domain Proses Bisnis, Data dan Informasi, Aplikasi, dan Layanan (Tidak termasuk Infrastruktur dan Keamanan) untuk Program Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Barat.

I.4 Batasan Penelitian

Batasan dari penelitian ini, antara lain:

1. Tahap perancangan arsitektur akan difokuskan untuk domain Proses Bisnis, Data dan Informasi, Aplikasi, dan Layanan.
2. Perancangan EA ini akan mengadopsi framework TOGAF ADM 9.2 dengan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah.

I.5 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian tugas akhir ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung, antara lain:

1. Membantu BAPPEDA Provinsi Jawa Barat dalam analisis dan perancangan *Enterprise Architecture (EA)* hingga dihasilkan *blueprint* pada domain Proses Bisnis, Data dan Informasi, Aplikasi, dan Layanan

(Tidak termasuk Infrastruktur dan Keamanan) untuk menyediakan tampilan komprehensif dari peraturan, prinsip, layanan, solusi, standar, hingga pedoman organisasi guna mendukung optimasi penyediaan layanan publik.

2. Menjadi referensi dan dasar informasi bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan analisis dan perancangan Enterprise Architecture (EA) pada domain Proses Bisnis, Data dan Informasi, Aplikasi, dan Layanan pada ruang lingkup Perangkat Daerah.
3. Memberikan informasi untuk penulis terkait penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam perancangan Arsitektur Enterprise yang dapat digunakan untuk mendukung layanan publik oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.